**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat di disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak dan reribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Bulukumba mási relatif rendah ini terlihat dalam kurung waktu 2011-2015 hanya dua kali melampaui target hal ini disebabkan beberapa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola secara maksimal.
2. Perolehan sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) pajak dan retribusi, didominasi oleh pajak.
3. Pola penetapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah di kabupaten Bulukumba didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yakni (1) UUD 1945 Pasal 23A; (2) UU No. 28/2009 pengganti UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000; (3) PP No. 65/2001; (4) PP No. 66/2001; (5) Beberapa Perda di wilayah lokasi penelitian.

56

1. **Saran**
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bulukumba mempertahankan dan meningkatkan pemasukan anggaran melalui pajak, dengan mendorong kesadaran para masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan beban yang ada.
3. Diharapkan pemerintah meningkatkan retribusi menjadi sangat kuat dengan mendorong pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk pegawai untuk lebih giat untuk mengusahakan retribusi.
4. Diharapkan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait peraturan daerah agar tidak menyulitkan investor sehingga semakin banyak pengusaha yang berinvestasi yang pada ahirnya akan tercipta lapangan kerja dan akibatnya daerah memperoleh manfaat dari pembayaran pajak maupun retribusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barata*,* Atep Adya *Pendapatan Asli Daerah .’’ terjemahkan Barata. Jakarta 2004*

Davey. *Perpajakan Daerah*. Terjemahan Amarullah. Jakarta.1988

Elita. 2007. *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali

Koswara. 1999. *Komponen Pendapatan Asli daerah’’*. Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2003. *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah*) jakarta: Rajaja Grafindo Persada

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 *Tentang norma Perhitungan Penghasilan Netto dan Tata Cara Pembuatan Catatan Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Netto Dengan Menggunakan Norma Perhitungan.*

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 *Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto Dan Tata Cara Pembuatan Catatan Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Netto Dengan Menggunakan Norma Perhitungan.*

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-545/PJ/2000 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Keputusan Menteri Nomor 447/KMK.03/2002 *Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pph.*

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.

NN, 2003*. Pendapatan Asli Daerah.* Erlangga*.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2011 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2010-2015*

Prawiroharjo,Sutrisno.1984. *Retribusidaerah.* Jakarta: Terjemahan Geodhart.

Pratiwi. 2007. *Proposi pendapatan asli daerah*. Rajawali

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta

Soemitro,Rochmat.1982. *Pajak Daerah*. Terjemahan Geodhart. Jakarta

Syamsi. 1998.*Pendapatan Asli Daerah (PAD).* Jakarta:Erlangga.

Sumitro,1995. *Pertumbuhan Pembangunan Ekonom*i. Jakarta: BalaiPustaka

Sutrisno. 1984. *Konsep Pendapatan Asli Daerah.* Rajawali.

Smeet. 1982. *Pajak Daerah*. Terjemahan Geodhart. Jakarta.

Supriatna, Tjahya*.* 1993. *Perusahaan Daerah*.

Undang-undang No.32 tahun 2004.*Undang-undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.

Widjaja. 2002. *Pendapatan asli daerah.* Jakarta: UI.

Universitas Negeri Makassar. 2010. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Makassar. Badan Penerbit UNM